

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDWAN MANSYUR
2. Jabatan : HAKIM KONSTITUSI
3. NHK : 13603

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.260.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/25 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 700 m²/72 m² di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
- Tanah Seluas 344 m² di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 260.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 192 m²/384 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 415 m²/168 m² di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

- MOBIL, TOYOTA ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T LUX DIESEL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.210.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.053.178.919

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.743.178.919

III. HUTANG Rp. 140.250.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.602.928.919

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.